



# 30 Unit Rusunawa Merunda Disegel

## Banyak Laporan Unit Rusun Diperjualbelikan

LANTARAN banyak laporan penyewaan, pengalihan dan penjualan unit, membuat jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggelar pendataan, kemarin (24/5). Pendataan berbentuk inspeksi mendadak (sidak) itu digelar ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Sidak itu juga untuk mencari bukti bukan hanya pengalihan unit rusunawa tapi juga adanya laporan jual beli unit rusun yang mendapatkan subsidi pemerintah daerah (pemda) tersebut. Dalam sidak tersebut, petugas akhirnya menyegel 30 unit rusunawa yang tidak sesuai nama dan penghuninya.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Ika Lestari Aji mengatakan sidak dilakukan jajarannya guna melakukan penertiban. Dia juga mengatakan, penertiban oleh tim gabungan. Yakni petugas Dinas Perumahan Gedung Pemerintahan bersama Satpol PP, Disdukcapil dan Bank DKI.

"Ada 24 blok dari 3 cluster yang ada di Rusunawa Marunda yang kami sidak satu per satu. Dengan jumlah personel gabungan yang menggelar sidak sebanyak 250 orang," terang Ika yang memimpin langsung operasi didampingi Kepala UPRS Wilayah I Rahman, kemarin (24/5).

Dia juga menegaskan, sidak dilakukan untuk menertibkan unit-unit rusunawa yang tidak sesuai KTP, Surat Perjanjian (SP) sewa dan belum memiliki atau membayar sewa di Bank DKI. Selain itu, sidak unit rusunawa juga dilakukan untuk membenahan administrasi-administrasi yang tidak lengkap.

"Kami melakukan segel unit rusunawa bila ditemukan tidak sesuai data warga yang berhak menempati rusun itu," jelas Ika lagi. Ia menambahkan, selain itu pihaknya juga melakukan perpanjangan surat perjanjian sewa. Karena itu, warga segera menghubungi pengelola Rusunawa Marunda untuk mengu-

rus data-data.

"Adapun batas waktu penyegelan 14 hari. Jadi warga bisa mengurus administrasinya, sebelum batas waktu tersebut," beber Ika juga. Dia juga mengancam, jika warga pemilik rusunawa tidak segera menyelesaikan administrasi penyegelan unit rusun itu nanti akan dialihkan ke warga yang lain. "Sebab masih banyak yang membutuhkan," imbuhnya juga

Menurut Ika lagi, warga yang tinggal di rusunawa, harus punya Surat Perjanjian. "Kalau mau keluar rusunawa, harus berkordinasi dengan pihaknya dan tidak boleh langsung dijual SP (surat perjanjian) rusunawa itu. Sebab yang tinggal di rusunawa itu, untuk mereka yang tidak mampu," katanya lagi.

Lebih lanjut Ika mengatakan, terkait pengawasan rusun pihaknya akan berkordinasi dengan aparat, camat, lurah serta RT dan RW setempat. "Supaya unit rusun aman. Agar tidak ada transaksi jual beli unit rusunawa dan penyelewengan lainnya. Seperti adanya prostitusi dan transaksi narkoba di rusunawa

ini," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Polisi Pamong Praja (PP) DKI Jakarta, Kukuh Hadi, mengatakan pihaknya akan membantu melakukan penertiban rusunawa yang pengelolannya dilakukan pemerintah daerah. "Supaya tidak ada penyelewengan, seperti unit rusunawa disewakan dan diperjualbelikan kepada orang," terangnya.

Sedangkan Ketua RT 06/10, Kelurahan Marunda Andi masarafi mengatakan kebanyakan unit yang disegel berada di Blok A 6. Unit rusunawa yang disegel itu kebanyakan karena tidak dihuni dan belum balik nama surat perjanjian rusunawa.

"Namun sebenarnya mereka sudah urus, cuma belum bisa. Karena pejabatnya ganti. Syarat menem-pati rusunawa, kebanyakan sudah dipenuhi. Seperti harus ber KTP setempat. Pelunasan tunggakan, buka rekening bank. Itu semua pemberkasan sudah dilakukan. Namun itu tadi, pejabatnya ganti-ganti. Jadi belum selesai juga pemberkassannya," pungkasnya. (dai)

### Tata Cara Memiliki Rusun di Jakarta

1. Fotokopi KTP DKI Jakarta.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan surat nikah (bagi yang sudah berumah tangga).
3. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak tiga lembar.
4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak satu lembar.
5. Surat keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan (PM1).
6. Surat keterangan penghasilan atau slip gaji.
7. Materai empat buah, dan
8. Bagi pemohon yang lolos verifikasi wajib membuka rekening tabungan Bank DKI lalu menyeter jaminan 3 kali retribusi.

ANGGA GUMELAR/INDOPOS